Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia

Fikri , Saidah , Aris , Wahidin

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Abstract

This paper aims to respond contextualization of divorce through in fiqh and national law in Indonesia. This study is conducted with a qualitative descriptive using normative theological, sociological, and formal juridical approaches. The study shows that; 1) divorce is absolute right of a husband to his wife so that it is legitimate, the belief is actualized that divorce is spoken by husband is a legitimate fiqh perspective, because the law automatically applies who said it; 2) Divorce is done outside the Religious Court there is no legal force, wife cannot claim her rights, Islamic society must obey the legal system in Indonesia although talak is sourced from fiqh can apply automatically, but islamic society cannot ignore in law enforcement from the legal system that applies in Indonesia.

Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk merespon kontekstualisasi cerai talak baik dalam fikih maupun hukum nasional di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis, dan yuridis formal. Hasil studi menunjukkan bahwa cerai talak merupakan hak mutlak seorang suami kepada istrinya sehingga dianggap sah jika dilakukannya, keyakinan itu diaktualisasikan bahwa cerai talak yang diucapkan oleh suami adalah sah perspektif fikih, sebab hukum itu secara otomatis berlaku bagi yang mengucapkannya; Cerai talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai kepastian hukum, istri tidak dapat menuntut hak-haknya, masyarakat Islam dapat mentaati sistem hukum yang berlaku di Indonesia meskipun cerai talak bersumber dari fikih dapat berlaku secara otomatis, namun masyarakat Islam tidak dapat mengabaikan penegakan hukum dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: cerai talak, fikih, hukum nasional, sistem hukum, Indonesia

Author correspondence

Email: fikristainpare@gmail.com

Available online at <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index>

A. Pendahuluan

Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat Islam diatur dalam hukum keluarga di Indonesia yang berlaku sebagai hukum nasional.¹ Cerai talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, artinya memutuskan perkawinan dengan meniadakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.² Perspektif fikih bahwa cerai talak adalah ucapan dengan kata-kata yang jelas untuk menunjukkan perceraian. Sayyid Sabiq menyebutkan cerai talak adalah upaya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³

Istilah perceraian sudah sangat lazim dikenal dalam masyarakat Islam tanpa memberikan batasan siapa yang melakukan dari kedua belah pihak suami atau istri.⁴ Cerai talak adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh semua pihak, baik suami maupun istri, apalagi dengan anak-anak mereka. Cerai talak akan berdampak sosial dalam masyarakat dan keluarga pada *image* buruk, bukan hanya suami atau istri, namun juga pada anak-anak dalam keluarganya. Cerai talak dapat merusak hubungan yang mengakibatkan permusuhan dari keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Dengan begitu, talak bukan merupakan solusi yang terbaik menyelesaikan masalah dalam perkawinan, tetapi justru dapat menjadi pemicu munculnya konflik baru yang sangat berkepanjangan.

Cerai talak sebetulnya adalah perbuatan yang paling dibenci Allah Swt. meskipun halal dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, cerai talak harus dihindari baik suami maupun istri dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Peran keluarga yang bertindak sebagai mediator sangat diperlukan dalam meredam apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Bukan sebaliknya yang dapat berperan dalam memperkeruh situasi suami dan istri jika timbul perselisihan yang mengancam keutuhan rumah tangganya.⁵ Fungsi peran mediator adalah meminimalisir jatuhnya cerai talak.

Kaitannya dengan cerai talak dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

¹Muhammad Siddiq Armia, Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?, *Al-Adalah*, Vol. 15, No. 2, 2018, h. 437-450.

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 73.

³Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunah, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h.206 dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Cet.3; Jakarta: Kencana, 2006), h. 207.

⁴Ahmad Misbahul Zaman, Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian, *Al-Hukuma, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 08, No. 02, 2018, h. 508-530. Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 10, No. 1, 2016, h. 51-68. Febri Handayani, Syaflawar, Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Al-Himayah*, Vol.1, No. 2, 2017, h. 227-260.

⁵Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat Perbandingan, dari Tekstualitas Sampai Legislasi* (Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.243.

Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat 1 dinyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama. Tentunya perceraian yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah cerai talak dan cerai gugat.⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 disebutkan bahwa “mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat. Pasal 115 KHI mempertegas bahwa “yaitu untuk orang Islam bahwa perceraian yakni cerai talak atau cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁷

Cerai talak dalam masyarakat Islam mengindikasikan putusannya ikatan perkawinan pada saat suami mengucapkan kepada istrinya. Akan tetapi, pemahaman masyarakat Islam di Indonesia meskipun cerai talak telah jelas hukumnya dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI, namun masih sering dijumpai praktinya dalam masyarakat bahwa apabila suami telah mengucapkan talak berarti sudah cerai dengan istrinya.

Hal itu disebabkan oleh kebanyakan masyarakat Islam di Indonesia yang terpolarisasi dengan pemahaman hukum yang diadopsi dari pandangan para imam mazhab dalam fikih.⁸ Minimnya pengetahuan suami terhadap cerai talak sehingga kadang-kadang diyakini dan dianggap sah atau memiliki kekuatan hukum meskipun dilakukan di luar Pengadilan Agama. Keyakinan itu terbukti dengan masih banyak terjadi dalam masyarakat Islam yang berani melakukan perkawinan baru tanpa cerai talak melalui putusan hakim di Pengadilan Agama.

Bersandar kepada sistem hukum di Indonesia,⁹ maka setiap perbuatan hukum dari suatu peristiwa harus diimplemetasikan dalam peraturan hukum, termasuk dalam undang-undang dan seterusnya. Demikian halnya peraturan tentang cerai talak mesti disandarkan kepada UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI terkait dengan proses penyelesaiannya, sehingga legalitas cerai talak di Indonesia adalah wajib dilakukan di Pengadilan Agama. Hal itu berarti hukum cerai talak dari segi yuridis formal harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam. Cerai talak hanya dapat dilakukan dan sah secara yuridis formal apabila ada putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama.

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 74.

⁸Saifudin Zuhri, Menempatkan Nilai-Nilai Fikih Islam dalam Proses Modernisasi dan Perubahan Sosial, Studi tentang Teori al-Tufi Mazhab Hanbali, *Al-Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, 2014, h. 167-187.

⁹Kasjim Salenda, Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 16, No. 1, 2016, h. 229-245.

Eksistensi Peradilan Agama sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan semua perkara dalam bidang hukum Islam.¹⁰ Sebelum hakim memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama tentunya sangat diuntungkan dengan mediasi.¹¹ Cerai talak yang sah dan memiliki kepastian hukum hanya dapat diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, sedangkan cerai talak yang tidak diucapkan di Pengadilan Agama adalah sah perspektif fikih, namun tidak dapat memberikan kekuatan hukum. Akibat hukum cerai talak yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama adalah dianggap masih dalam ikatan perkawinan sebagai suami-istri yang sah selama belum ada putusan hakim di Pengadilan Agama. Dalam konteks hukum, baik suami maupun istri masih sah statusnya sebagai suami-istri.

Praktisnya di masyarakat Islam masih ada suami berasumsi bahwa ketika cerai talak tidak dilakukan di Pengadilan Agama sudah dianggap sah dan perkawinan sudah putus. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada suami yang sudah mengucapkan cerai talak kepada istrinya, kemudian selanjutnya melakukan perkawinan baru. Pemahaman yang masih ambigu dalam arti pemahaman yang masih mendua dalam masyarakat Islam oleh sebagian orang, termasuk para suami yang belum memahami sistem hukum nasional adalah sangat *urgen* untuk dikaji dalam meluruskan legalitas cerai talak, sehingga tidak membenturkan antara fikih dan hukum nasional yang berlaku di negara Indonesia.

Tulisan ini mengelaborasi beberapa permasalahan tentang kontekstualisasi hukum cerai talak dalam fikih dan penetapan hukum talak dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Permasalahan yang diajukan itu diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam kajian-kajian akademik sekaligus klarifikasi dalam menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Indonesia sehingga pemahaman yang mendua dapat terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

B. Kontekstualisasi Cerai Talak Perspektif Fikih di Indonesia

Peraturan hukum yang bersumber dari syariat esensinya mesti berlaku secara otomatis bagi masyarakat Islam sebagai konsekuensi dari penyaksian dalam kalimat dua syahadat. Masyarakat Islam harus tunduk dan taat kepada hukum Islam. Hukum syariat sangat jelas dan pasti tujuan hukum yang diperuntukkan kepada manusia, sehingga dalam pelaksanaannya tidak selamanya diperlukan banyak pengetahuan. Sebab akal yang dimiliki manusia tidak selamanya mampu menangkap maksud atau tujuan hukum

¹⁰Fikri, Andi Bahri, Budiman, Islamic Inheritance Legislation toward The National Law: The Analysis of Justice Values in Bacukiki, *Al-Risalah*, Vol. 17, No. 1, 2017, h. 51.

¹¹Nurlaili Rahma, Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan Adanya Perma No. 1 Tahun 2016, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6. No. 1, 2018, h. 84-105.

syariat diturunkan oleh Allah Swt. penaatan terhadap hukum syariat sarat dengan muatan kemaslahatan yang akan diperoleh manusia. Artinya kemaslahatan yang terkandung dalam hukum syariat itu tidak memberatkan beban kehidupan manusia di dunia.¹²

Hukum syariat yang bersumber dari Allah Swt. adalah agar manusia menemukan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Hukum syariat tidak boleh bertentangan dengan maslahat, apalagi mengandung kesulitan apalagi dalam semua urusan manusia.¹³ Dengan demikian, hukum syariat mutlak mendatangkan maslahat dengan berbagai manfaat bagi manusia.

Hukum syariat yang dalam praktisnya disebut hukum Islam yang diformulasi di dalam fikih adalah paling efektif membentuk tatanan sosial masyarakat.¹⁴ Itu sebabnya hukum syariat diakui sebagai hukum yang paling mudah untuk menyesuaikan dengan karakter setiap masyarakat. Hukum yang mampu merefleksikan pikiran dan perilaku setiap manusia daripada hukum manapun. Kenyataan itu hukum syariat dapat diterima dan berlaku baik dalam konteks masyarakat Islam maupun di luar masyarakat Islam.

Selanjutnya, usaha penemuan hukum Islam dari pemikiran-pemikiran para imam mazhab dalam fikih, tidak lain adalah upaya pencarian dan perumusan yang bersumber dari kehendak Allah Swt. Kehendak Allah Swt. yang dimaksud bukan suatu sistem yang statis tanpa mengalami perubahan, melainkan merupakan perubahan prinsip-prinsip yang terungkap dan terjabarkan secara progresif.¹⁵ Hukum Islam tidak akan menghadapi pergeseran, statis dan kaku tentang daya keberlakuan dalam segala zaman. Esensialnya hukum Islam selamanya disandarkan dengan kehendak Allah Swt. sehingga menyatuh semua situasi dan kondisi budaya yang diciptakan oleh manusia.

Hukum cerai talak dalam hukum Islam, penting dielaborasi lebih mendalam agar nantinya sepasang suami istri tidak semena-mena atau bermain-maikan talak. Sejatinya dengan cerai talak adalah sebelum calon suami-istri memasuki masa perkawinan, menarik untuk dibekali pengetahuan bahwa perkawinan adalah akad yang mengikat,

¹²La Jamaa, Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan hukum Islam, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2013, h. 2-3.

¹³Absori, Aidul Fitriadi Azhari, M. Mui'nudinillah Basri, Fatkhul Muin, Transformation of Maqashid Al-Syariah (An Overview of the Development of Islamic Law in Indonesia), *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1, 2016, h. 1-18. Miskari de Ahmad, Pendekatan Sistem Sebagai Konsep Maqashid Syariah dalam Perspektif Jaser Audah, *Al-Maslahah; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2018, h. 113-138.

¹⁴Mohd. Winario, Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 261-276.

¹⁵Fikri, Pemikiran Rahasia Hukum Islam dalam Ruang Publik (Huquq Allah), *Diktum, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.13 No.1,2015, h. 13-14.

kekal abadi. Bahkan para ulama ahli fikih, dan juga UU RI. No.1 Tahun 1974 ditemukan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat suci dan kuat, di antara salah satunya tidak boleh ada yang bermaksud untuk memutuskan atau melakukan perceraian termasuk cerai talak yang diucapkan oleh suami.

Di sisi lain, perkawinan adalah menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lebih tegasnya perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁶ Kesakralan dan kesucian dari ikatan perkawinan di samping sebagai ibadah juga dan sunnah rasulullah saw. Selanjutnya, tujuan perkawinan oleh suami-istri agar dapat mewujudkan rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Perkawinan yang sarat dengan kasih sayang, dibangun dengan cinta, bahagia, dan kekal abadi adalah obsesi setiap suami-istri, sehingga tidak ada di antara mereka yang menghendaki perkawinannya bubar di tengah jalan.¹⁷

Apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan yang berujung kehancuran dan kemudharatan, maka fungsi hukum Islam yang terkonsep dalam fikih harus ditaati oleh masyarakat Islam memberikan ruang dengan cerai talak atau cerai gugat. Prinsipnya perceraian dalam fikih termasuk cerai talak harus dihindari oleh setiap suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun cerai talak merupakan alternatif terakhir, namun dapat dimaksimalkan melakukan konsolidasi keluarga-keluarga terdekat masing-masing dari pihak suami atau istri, sehingga perkawinan yang dikonstruksi tidak mengalami jalan buntu.

Konsepsi cerai talak dalam fikih dipetakan dua macam; *pertama*, talak *raj'i* yaitu suami memiliki hak merujuk istrinya, dan *kedua*, talak *bain* adalah meniadakan hak rujuk. Akibat hukum dari talak *bain sugra* artinya harus ada akad nikah baru jika bekas suami ada niat untuk kembali bersama istrinya.¹⁸

Intinya dengan talak *raj'i* adalah cerai talak yang memosisikan suami masih memiliki hak rujuk kepada istrinya. Hanya saja dalam budaya masyarakat Islam khususnya masyarakat Bugis, jika suami jelas mengatakan cetak talak sebagai simbol perceraian kepada istrinya, secara adat dikenal dengan istilah "*nikka ulang*" yang berarti nikah harus diperbarui, tetapi tidak membuat akad baru lagi. Lain halnya dengan talak *bain sugra* yang menjadikan suami tidak ada lagi hak untuk rujuk kepada istrinya, artinya jika suami hendak merujuk istrinya maka harus ada akad baru.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet.2; Jakarta: Kencana, 2007), h. 41

¹⁷Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 2

¹⁸Sadari, Hak Perempuan Pasca Perceraian : Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia Dan Dunia, *Makalah*, h. 5.

Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia

Cerai talak artinya lepasnya atau berakhirnya ikatan perkawinan yang merupakan hak suami. Formulasi cerai talak yang sangat sederhana yakni melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.¹⁹ Kaitannya dengan perkawinan selalu dipersepsikan sakral, suci dan ibadah, sehingga setiap terjadi percekocokan tidak harus berakhir dengan perceraian. Melaksanakan perkawinan bukan tujuan utamanya hanya untuk merubah status, namun signifikansinya adalah membangun keluarga atau rumah tangga yang tenteram, tenang, cinta dan kasih sayang.

Hukum asal cerai talak dalam fikih adalah makruh, namun dapat ditemukan bahwa hukumnya wajib, haram, dan dapat pula mubah. Cerai talak hukumnya wajib adalah bertujuan menyelesaikan pertengkaran suami istri, dan cerai talak merupakan pilihan terbaik dalam mengakhiri pertengkaran. Cerai talak hukumnya haram adalah dilakukan bukan karena tuntutan yang dibenarkan dan akan melahirkan kerusakan bagi kedua belah pihak. Cerai talak hukumnya mubah jika menunjukkan hal-hal yang tidak dapat ditolerir, seperti istri melakukan selingkuh.²⁰

Merujuk pada hukum asal cerai talak adalah hak suami berarti sah jika tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Sebab, pendapat yang sangat familiar adalah suami dapat menggunakan hak talak kapan dan di mana saja. Cerai talak dalam fikih adalah sah ketika suami mengucapkan kepada istri, meskipun bukan dilakukan di Pengadilan Agama. Sebelum keberadaan Peradilan Agama dengan hukum materilnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI, maka talak tidak lagi diakui yang terjadi di luar Pengadilan Agama.

Para fuqaha berpendapat bahwa cerai talak itu harus disertai niat. Pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali, mengatakan bahwa seorang suami yang mengucapkan cerai talak memerlukan niat atau petunjuk dari keadaan. Imam Maliki berpendapat bahwa menjatuhkan cerai talak oleh suami adalah cukup ucapan, tanpa dengan niat. Penyataaan cerai talak oleh suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang telah terformulasi di berbagai pemikiran fuqaha dianggap sah, telah putus hubungan perkawinan sebagai suami istri.²¹

Pandangan Imam Syafi'i tentang cerai talak berarti melepaskan akad nikah dengan lafadz yang *zahir* dan atau kata yang semakna dengan talak. Imam Hanafi dan Hanbali berpandangan bahwa cerai talak adalah tindakan dalam bentuk ucapan dengan maksud memutuskan ikatan perkawinan secara langsung dengan penggunaan lafadz

¹⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet.2; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.229.

²⁰Moh. Afandi, *Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW*, *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, 2014, h. 193-194.

²¹Siti Sri Rezeki Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Islam, *Makalah*, h. 11.

tertentu. pendapat lain yakni Imam Maliki mengatakan bahwa cerai talak sebagai tindakan kepada suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.²²

Berkaitan dengan pemikiran para fuqaha ditegaskan bahwa cerai talak yang diucapkan suami dalam keadaan sadar atau tidak sadar kepada istrinya dianggap sah perspektif fikih.²³ Maksudnya selama dalam masa perkawinan, suami harus menahan dirinya mengeluarkan kata-kata yang mengarah dengan perceraian seperti cerai talak. Akibat hukum cerai talak itu sendiri, suami telah mengucapkan talak dan jika ingin rujuk kepada istrinya adalah boleh tanpa ada akad baru lagi. Demikian solusi akibat hukum cerai talak yang ditemukan dalam pemikiran para fuqaha. Fuqaha seperti Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbali dan Imam Syafi'i bahwa cerai talak sah dengan disertai niat. Selama cerai talak itu diucapkan saja tetapi tidak bersama dengan niat berarti cerai talak itu tidak sah.

Semua fuqaha memberikan elaborasi terhadap talak dari segi waktu suami mengucapkan cerai talak, ada dua macam yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*. Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Konteks misalnya, istri ditalak namun pernah digauli, praktis segera menjalankan masa iddah. Talak *bid'i* merupakan talak yang diucapkan oleh suami tetapi bertentangan dengan tuntunan sunnah. Misalnya, talak yang diucapkan ketika istri sedang haid dan pernah digauli. Selanjutnya, cerai talak bukan kategori talak *sunni* dan talak *bid'i* adalah talak yang diucapkan oleh suami namun belum pernah menggauli istrinya, istri belum pernah mengalami menstruasi, dan istri dalam keadaan masih hamil.²⁴

Cerai talak yang diucapkan secara *sharih* atau tidak, terdiri dari dua macam; *pertama*, talak *sharih* yaitu mengucapkan kata-kata yang jelas dan tegas dan dapat dimengerti bahwa maksudnya cerai. Konsekuensi hukum dari ucapan talak *sharih* menjadi sah dengan sendirinya ketika dinyatakan dalam keadaan sadar dan bukan paksaan. *Kedua*, talak *kinayah* yaitu ucapan dengan kata-kata sindiran, samar-samar, kata yang diucapkan bermaksud cerai atau sebaliknya.²⁵

Konteks talak *raj'i* dalam fikih memiliki masa iddah dengan memungkinkan suami untuk rujuk kepada istrinya. Namun jika masa iddah itu habis maka talak *raj'i* menjadi talak *bain* yang mengharuskan suami membuat akad baru jika ingin rujuk

²²Aiya Ernita, *Perkawinan Dengan Perempuan Yang Dicerai Diluar Pengadilan (Studi Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)*, h.3-4.

²³Riyan Erwin Hidayat, Pendapat Imam Mazhab tentang Hak Istri Iddah Talak Bain dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Istinbath*, Vol.15, No. 1, 2018, h. 145-156.

²⁴Makmun Syar'i, Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan, *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2015, h. 69.

²⁵*Ibid*, h. 69-70.

kepada istrinya. Oleh karena itu, pemahaman atas talak *raj'i* itu meskipun suami telah mengucapkan cerai talak, maka boleh jika ingin rujuk kepada istrinya sebelum habis masa iddah baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tindakan.

Merujuk berarti suami boleh kembali kepada bekas istrinya dengan mengembalikan ikatan perkawinan seperti semula. Cerai talak yang diucapkan suami dengan talak *raj'i* dalam kondisi kekinian dinyatakan sah dan berlaku dalam masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang cerai talak yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama bahwa tidak legal sepanjang belum ada putusan hakim.

Selain talak *raj'i*, dalam fikih dikenal pula talak *ba'in* adalah thalak yang tidak ada hak suami untuk merujuk bekas istrinya. Talak *bai'n* ada macam, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *bain kubra*. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang ada kebolehan bekas suami merujuk istrinya, melainkan bekas suami membuat akad nikah baru, baik suami yang diceraikan gugat maupun sesudah berakhir masa iddah istrinya. Sementara talak *bai'n kubra* adalah seorang suami menyebut talak tiga kali berturut-turut atau lebih dalam satu tempat, sehingga tidak halal menikahi bekas istrinya meskipun membuat akad baru, kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai sampai selesai masa iddahanya.²⁶

Pemahaman cerai talak dalam fikih dipandang sah ketika rukun dan syarat telah dipenuhi oleh suami. Problematika cerai talak tidak ada ketentuan dalam fikih klasik yang mengharuskan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Akan tetapi, cerai talak telah dianggap jatuh dan sah pada saat suami mengucapkannya kepada istrinya baik disengaja maupun tidak disengaja. Doktrin dalam fikih bahwa talak sebagai hak mutlak seorang suami kepada istrinya. Doktrin itu diyakini oleh mayoritas masyarakat Islam.

Akibat hukum dari talak *raj'i*, suami masih dibebani kewajiban untuk nafkah kepada istrinya selama belum habis masa iddah, sebab sebenarnya perempuan itu masih istrinya. Bahkan, bekas istri yang diceraikan talak masih boleh tinggal satu atap dengan bekas suaminya, dan boleh menghiiasi diri seperti bersolek dan berdandan. Suami masih berhak rujuk dengan mengucapkan kepada bekas istrinya seperti “aku mau rujuk kepadamu”. Selanjutnya, apabila suami bercampur dengan bekas istrinya, berarti tindakan itu mengindikasikan suami merujuk bekas istrinya.

Kaitannya dengan cerai talak yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam, seolah-olah dipahami ada dikotomi dalam fikih yang berbeda dengan pelaksanaannya dalam hukum nasional di Indonesia. Problematika cerai talak dalam masyarakat Islam dilatarbelakangi penetapan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 2 Tahun 2015 tentang talak. Setelah fatwa itu dinyatakan berlaku, setiap

²⁶*Ibid.*

ketetapan Mahkamah Syariah termasuk ketetapan dalam masalah perceraian diantaranya talak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan produk hukum fikih.²⁷

Status cerai talak dalam fikih adalah memiliki legalitas yakni sah sebagaimana pemahaman yang berlaku dalam masyarakat Islam. Legalitas cerai talak adalah sah tanpa ada putusan hakim dari Pengadilan Agama. Pemahaman oleh sebagian masyarakat Islam itu di Indonesia tentang cerai talak cukup diucapkan oleh suami dan berlaku konsekuensi atas ucapannya itu. Pemahaman itu dikuatkan dari teori kredo atau teori syahadat yang diucapkan oleh umat Islam bahwa konsekuensi pada setiap orang yang telah mengucapkan syahadat, secara otomatis berlaku hukum Islam atasnya. Talak yang diucapkan oleh suami adalah legal, sebab hukum itu secara otomatis berlaku bagi yang mengucapkannya. Masyarakat Islam yang fundamental, sangat berhati-hati terhadap talak, sebab suami mengucapkan talak kepada istrinya sudah berkuat hukum.

C. Penetapan Hukum dalam Hukum Nasional di Indonesia

Hukum nasional di Indonesia yang mengatur permasalahan talak yang dimaksud adalah UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun UU RI. No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan, namun dalam undang-undang itu tersebut tidak mengesampingkan tata cara penyelesaian perceraian. Ditegaskan bahwa perceraian yang diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, berarti dimaksudkan dengan salah satunya adalah talak.

Penjelasan dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa prinsip perkawinan yang harus diusahakan oleh suami dan istri, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal abadi dan bahagia. Prinsip itu diletakkan sebagai pondasi kuat dalam membangun keluarga dan rumah tangga perspektif UU RI. No.1 Tahun 1974 bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Prinsip-prinsip perkawinan dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut; 1) tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan dengan nilai-nilai dan norma keagamaan; 2) dilaksanakan dengan hukum agama oleh suami dan istri; 3) perkawinan adalah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang harus dicatat oleh Pejabat Pencatat nikah (PPN) di KUA; 4) menerapkan asas monogami bahwa hanya seorang suami menikah dengan seorang istri; 5) setiap calon suami dan istri matang fisik dan psikis, suami minimal berumur 19 tahun dan 16 tahun calon istri; 6) mempersulit terjadinya peristiwa perceraian termasuk talak; dan 7)

²⁷Nuridin Bakri Antoni, Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1. 2017, h.57-58.

Seimbang kedudukan atau hak suami dan istri, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat yang bermakna (a) suami dan istri hidup *harmony, equity, and equilibrium*, (b) berbagi tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta kewajiban dan hak individual dalam kolegalitas, dan (c) saling mengisi *joint with giving and receiving together* dalam melakukan berbagai aktivitas.²⁸

Keseimbangan hidup harus diaktualisasikan dalam pergaulan berumah tangga dan pergaulan bermasyarakat, sehingga mampu meminimalisir problema yang mengancam kehidupan keluarganya. Kelihatannya berbagai prinsip perkawinan dalam pandangan Musdah Mulia, seharusnya segera diaktualisasikan sebagai realitas masyarakat demokratis, adil, dan religius. Di samping dari prinsip perkawinan itu untuk memberdayakan kedudukan dan peran istri. Hal itu sangat signifikan untuk menyesuaikan prinsip perkawinan terhadap dinamika keluarga kontemporer Indonesia, dan menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin meningkat.²⁹

Kenyataan di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga kini, berlaku sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengutamakan berlakunya hukum Islam.³⁰ Pasca era reformasi, peraturan perundang-undangan yang menunjukkan berlakunya hukum Islam dalam sistem hukum nasional, misalnya UU RI. No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, UU RI. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat perubahan dan perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa.³¹

Pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan sebagai amanat dari UUD RI. Tahun 1945.³² Saat ini, hampir peluang hukum Islam berlaku secara total, baik dalam ruang hukum keluarga maupun dalam ruang hukum muamalah.

Implementasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak hanya diberlakukan pada tataran undang-undang saja, akan tetapi kerap kali dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah dengan spirit penegakan syariat Islam yang disebut perda syariah.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 72-73.

²⁹ Siti Musawwamah, Keterlibatan Perempuan Pada Penyelesaian Kasus Kdrt Di Pengadilan Agama, *al-Ihkâm*, Vol.7, No .1, 2012, h. 64.

³⁰ Titin Samsudin, Dinamika Hukum Islam dan Perubahan Sosial, *Istinbath; Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2018, h. 4.

³¹ Labib Muttaqin, Positifisasi Hukum Islam Dan Formalisasi Syari'ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl, *Al-Ihkâm*, Vol.11, No.1 2016, h. 79-80.

³² Bahder Johan Nasution, Eksistensi Lembaga Peradilan dalam Negara Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015, h. 200.

Uraian itu menggambarkan bahwa usaha untuk memformalkan hukum Islam menjadi hukum nasional juga sudah banyak diperjuangkan oleh ormas-ormas dan partai politik Islam di Indonesia. Ketika hukum Islam telah melembaga dalam hukum nasional, maka masyarakat Islam tidak memiliki pilihan lain kecuali mentaati hukum Islam sebagai hukum bersifat memaksa.³³

Pasal 2 ayat 2 dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, sedangkan dalam KHI Pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Pencatatan perkawinan dalam pasal tersebut bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam. Upaya yang diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 dan KHI adalah melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan secara spesifik melindungi hak-hak istri dalam rumah tangganya.³⁴

Tujuan pencatatan perkawinan yang diatur UU RI. No. 1 Tahun 1974 dan KHI, adalah untuk menciptakan ketertiban setiap perkawinan. Selain pencatatan perkawinan dalam mewujudkan ketertiban, juga memberikan legalitas perkawinan yang berkekuatan hukum tetap. Ketertiban pencatatan perkawinan menjadi analogi terhadap talak yang dilakukan oleh suami, agar mempunyai kekuatan hukum yang tidak hanya diucapkan saja, akan tetapi dapat dibuktikan melalui putusan hakim di Pengadilan Agama.

Permasalahan dalam perkawinan dengan istri yang ditalak oleh suaminya dalam masyarakat, UU RI. No 1 Tahun 1974 memberikan pengertian talak yakni putus perkawinan atas kehendak suami dengan ucapan tertentu. Perspektif UU RI. No. 1 Tahun 1974 bahwa yang sah adalah dalam bentuk ucapan dan tertulis dengan putusan hakim di Pengadilan Agama.

Perkawinan putus sebagaimana dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI, sebagai berikut: 1) kematian, 2) perceraian, dan (3) atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena thalak atau dapat pula dengan gugatan perceraian. Perceraian karena talak dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian karena talak terhitung sejak dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan-alasan, yaitu; 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3)

³³Lihat Labib Muttaqin, *Op.Cit.*, h. 80-82.

³⁴Aiya Ernita, *Op.Cit.*, h. 4.

salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 7) Suami melanggar taklik thalak, dan 8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁵

UU RI. No 1 Tahun 1974 memberikan peluang cerai talak apabila suami telah melakukan sebab, seperti salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Dengan begitu, tidak boleh ada salah pihak yang memutuskan perkawinan tanpa dengan putusan pengadilan. Talak yang terjadi di masyarakat berarti perceraian itu status hukumnya di bawah tangan.

Dasar hukum talak adalah Putusnya perkawinan yang diatur dalam; 1) Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU RI. No 1 Tahun 1974. 2) Pasal 14 hingga Pasal 36, Pasal 199 KUH Perdata. 3) Pasal 113 hingga Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI.³⁶ Bandingkan dengan kesadaran masyarakat Aceh dalam proses perceraian yang sah menurut hukum perkawinan adalah perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syariah. Lembaga *tahkim* bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara orang Islam. Perkawinan dengan istri yang ditalak di masyarakat sangat merugikan hak-hak pihak istri, karena talak dari bekas suaminya tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap istri dan anak-anaknya. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan Agama guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.³⁷

Konsekuensi hukum yang ditimbulkan disebabkan cerai talak suami di masyarakat, istri tidak dapat mendapatkan dan menuntut haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar. Dengan demikian, diharapkan suami dalam masyarakat untuk sadar dan taat hukum dengan melakukan cerai talak di depan sidang Pengadilan Agama. Tokoh masyarakat untuk selalu mengawasi masyarakatnya dalam melaksanakan proses perceraian, dan kepada Mahkamah Syariah untuk mengadakan penyuluhan hukum tentang proses talak di

³⁵Moh. Afandi, *Op.Cit.*, h.194-195.

³⁶*Ibid.*

³⁷Aiya Ernita, *Op.Cit.*, h.5.

pengadilan agar tidak ada lagi suami di masyarakat yang melakukan proses talak di luar pengadilan.

Selaras ketentuan menjatuhkan talak seperti pada Pasal 39 ayat (1): “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. selanjutnya dipertegas dalam Pasal 117 dalam KHI sebagai berikut; “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”. Pasal 129: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.³⁸

Atho Mudzhar menilai Pasal 39 ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 sangat berbeda dengan fikih klasik yang menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami, baik secara lisan maupun tertulis, secara sungguh-sungguh atau bersenda gurau. Tujuan Pasal 39 ayat 1 adalah dapat mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian. Adanya keharusan suami untuk menghadap ke Pengadilan Agama yang akan menceraikan istrinya, terdapat pula di Turki, Siprus, Tunisia, Algeria, Irak, dan Iran. Kebutuhan mengucapkan talak di depan Pengadilan Agama, praktis talak tiga yang dijatuhkan tidak berlaku. Sejumlah peraturan yang diberlakukan adalah melindungi hak-hak istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan.³⁹

UU RI. No.7 Tahun 1989 mengatur lebih khusus perkara perceraian, yaitu cerai thalak dalam Pasal 66 hingga Pasal 72, cerai gugat dalam pasal 73 hingga pasal 86, dan cerai karena alasan zina dalam Pasal 87 hingga Pasal 88. Sebelum suami mengajukan ke Pengadilan Agama, talak sebagai perkara permohonan, meskipun *jurisdictio volontaire* atau bersifat volunter, akan tetapi tidak mengurangi sifat *contentiosa*. Suami sebagai pemohon atau istri sebagai termohon. Pemeriksaan dilakukan dalam proses *contradictoir*.⁴⁰ Tegasnya dengan perkara talak hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Peradilan Agama adalah satu-satunya institusi yang dapat memutus perkawinan atau yang melegalkan talak.

Hukum talak di Indonesia menuntut hakim sebagai satu-satunya pejabat negara yang berwenang untuk memutus perkara cerai talak. Dengan kata lain, suami atau istri hanya menjadi pemohon dalam perkara talak atau cerai gugat di Pengadilan Agama.

³⁸Nuridin Bakri Antoni, Thalak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Thalak, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1. 2017, h. 58-59.

³⁹Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Cet. 1; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h.212-213.

⁴⁰Hj. Sulaikan Lubis, et.al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), h. 123.

Meskipun ikrar talak menjadi hak suami, namun ikrar talak tersebut baru dapat diucapkan kalau mendapat persetujuan hakim di Pengadilan Agama.⁴¹ Berkaitan dengan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pemeriksaan perkara cerai talak di Pengadilan Agama seperti yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama, cerai talak atau cerai gugat meskipun telah di putus oleh hakim, belum dapat dilaksanakan apabila suaminya belum menyatakan ikrar talak.

Pada konteks tertentu, alternatif cerai talak terpaksa digunakan yang hanya menjadi jalan dalam menyelesaikan pertengkaran suami dan istri. Berbagai faktor dominan penyebab cerai talak, salah satu pihak berpaling dari kewajibannya, percekcoakan tidak kunjung berakhir, salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah. Disamping itu, faktor lemahnya ekonomi misalnya selama berumah tangga suami tidak mempunyai pekerjaan tetap yang menyebabkan hidup dari penghasilan suami secara tidak teratur dan serba kekurangan, terpaksa menggantungkan hidup kepada orang tua atau saudara-saudaranya. Di sisi lain, kebutuhan hidup semakin tinggi yang menuntut suami harus kerja keras dalam mencukupi keperluan keluarganya. Konteks demikian, memaksa istri tidak lagi menunjukkan kesetiaannya kepada janji suci untuk hidup bersama dengan suaminya. Keadaan dapat diperparah jika ada campur tangan orang tua atau ada orang ketiga.⁴²

Sebaliknya, tidak selamanya faktor ekonomi menjadi penyebab cerai talak. Kebutuhan ekonomi dapat mewujudkan keluarga sakinah.⁴³ Namun, kebanyakan rumah tangga menjadi berantakan justru sebagai pemicu dari ekonomi yang sangat mapan, sehingga dapat menjadi alasan untuk cerai talak antara keduanya. Faktor itu dapat berakibat hilangnya kasih sayang dan cinta suami-istri, meskipun kehidupan rumah tangganya telah dibina berpuluh-puluh tahun lamanya. Problematika lainnya masing-masing dari pihak mau menang sendiri.⁴⁴

Talak dalam masyarakat Bugis memiliki konsekuensi yang sangat berat. Konsekuensi talak akan terlihat pada uraian selanjutnya. Namun dalam konteks kekinian, kenyataan talak dalam sebagian masyarakat Bugis hanya mengikuti hukum Islam dan sebageian yang lain dilakukan di depan Pengadilan Agama.

Kehidupan suami istri hanya dapat tegak dengan ada ketenangan, dan masing-masing pihak suami istri menjalankan hak-kewajibannya dengan baik agar dalam

⁴¹Moh. Afandi, *Op.Cit.*, h. 195.

⁴²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Cet. 3: Jakarta: Predana Media Group, 2010), h. 50-51.

⁴³Abdul Mu'in dan Mohammad Hefni, Tradisi Ngabula di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda), *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 24, No. 1, Juni 2016, h. 111.

⁴⁴Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, h. 50-51.

membangun perkawinan dapat mewujudkan keluarga sakinah.⁴⁵ Tetapi ada kalanya terjadi suami membenci istri atau istri membenci suami. Kebencian itu kadang-kadang tidak dapat terkendalikan yang menyebabkan perpecahan semakin sangat sulit menemukan jalan penyelesaiannya.⁴⁶ Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang harus ditempuh dengan cara perceraian. Jika kebencian adanya pada pihak istri maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan *khulu*.’ Firman Allah Swt. dalam al-Quran surat Al-Baqarah, ayat 229: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”⁴⁷

Kesesuaiannya dengan Putusan Gugat Cerai Nomor: 2878/Pdt.G/2010/PA Bandung, *khulu*’ menurut Malik bin Anas⁴⁸ diartikan sebagai *talak* dengan tebusan (*’iwad*) yang dibayar oleh istri atau yang lainnya, yang bertindak sebagai wali atau bukan atau dengan ucapan *khulu*’ dari suaminya. *Khulu*’ diperbolehkan dengan syarat dikehendaki oleh pihak istri dan suami tidak memadatkan terhadap istri. Hukum kebolehan *khulu*’ menurut Malik bin Anas berdasarkan pada nash al-Qur’an dan Al-Hadits dan hukum yang lainnya yang didasarkan pada kemaslahatan. Ukuran *’iwad* dan *khulu*’ Malik bin Anas berpendapat boleh kurang, sama bahkan lebih banyak dari apa yang telah suami berikan pada istrinya waktu dulu. Disamping itu pandangan Malik bin Anas ukuran yang dijadikan *’iwad* atau tebusan boleh dengan barang yang samar. Kedudukan *khulu*’ menurut Malik bin Anas adalah *thalak ba’in*. *Khulu*’ dapat menimbulkan akibat hukum lainnya, di antaranya adalah menyangkut ketidakabsahan mengikuti *khulu*’ pada *thalak* kecuali apabila bersambung, ketidakbolehan rujuk pada istri yang telah meminta *khulu*.⁴⁹ Dengan demikian, *khulu*’ itu berarti jatuh *thalak ba’in sugra*.

⁴⁵Khoiruddin Nasution, Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera, *Ahkam*, Vol. XV, No. 2, 2015, h. 183. Danu Aris Setiyanto, Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi, *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1, 2017, h. 26. Lili Purnamasari, Iwannudin, Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Metro Timur, *Mahkamah*, Vol.3, No. 2, 2018, h. 335.

⁴⁶Zulfatun Nimah, The Violation on Women’s Rights in Unilateral Divorce in Sasak Community From A Feminist Legal Theory, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2018, h. 25-48.

⁴⁷Yayan Sop Ahmad Hoyir, Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang *Khulu*’ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 16, No. 2, 2014, h. 161. Lihat Rahmi Hidayati, Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Pada Suku Anak Dalam, *Jurnal Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 1, Juni 2016, h. 161.

⁴⁸Muammar Bakri, Pengembangan Karakter Toleran dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih, *Al-Ulum*, Vol. 14, No. 1, 2014, h. 179.

⁴⁹Ahmad Hoyir, Pendapat Imam Malik Bin Anas tentang *Khulu*’ dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol.16. No. 2, 2014, h. 162-168.

Sebaliknya, cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami dengan pengajuan perkaranya diajukan di tempat yang mewilayahi wilayah yuridiksi tempat kediaman istri, selanjutnya suami disebut sebagai pemohon. Selanjutnya, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri dimana pengajuan perkaranya diajukan ditempat yang mewilayahi wilayah yuridiksi tempat kediaman istri. Akan tetapi, pemahaman sebagian masyarakat Islam seolah-olah membedakan antara hukum *syar'i* yang terdapat dalam fikih dengan sumber hukum acara materil lain yakni Kompilasi Hukum Islam. Pendapat yang demikian adalah keliru, karena Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan dari beberapa kitab kuning yang digali dan dibahas yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, kewarisan, wakaf dan shadaqah.⁵⁰

Ditegaskan oleh hakim bahwa cerai talak yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama adalah tidak ada kekuatan hukum atau tidak mempunyai kepastian hukum karena perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan begitu, masyarakat Islam dapat menguti dengan mentaati sistem hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun diyakini bahwa hukum Islam yang termuat dalam fikih dari berbagai pemikiran para fuqaha dapat berlaku secara otomatis, namun tidak dapat diabaikan penegakan hukum dari sistem hukum nasional yang dimaksud.

D. Kesimpulan

Cerai talak dalam fikih dipandang sah ketika suami memenuhi rukun dan syarat untuk menjatuhkan kepada istrinya. Cerai talak memang tidak ada kemestian dalam fikih klasik yang mengharuskan dilakukan di depan Pengadilan Agama, akan tetapi perkara cerai talak dapat diqiyaskan dengan perkara yang sejenis yang terjadi dalam masyarakat Islam pada saat itu, agar dihadapkan kepada hakim sebagai upaya untuk menyelesaikan perkaranya. Konteks dalam fikih bahwa hakim diqiyaskan sebagai Peradilan Agama yang berfungsi menyelesaikan setiap perkara masyarakat Islam. Kenyataan itu hingga saat ini berlaku doktrin dalam fikih bahwa cerai talak merupakan hak mutlak seorang suami kepada istrinya sehingga status cerai talak memiliki legalitas yakni sah sebagaimana pemahaman yang berkembang dalam masyarakat Islam. Cerai talak yang diucapkan oleh suami adalah legal perspektif fikih, sebab hukum itu secara otomatis berlaku bagi yang mengucapkannya.

Konsekuensi hukum yang ditimbulkan disebabkan cerai talak yang dilakukan oleh suami dalam masyarakat yang tidak dilakukan dalam Pengadilan Agama, istri tidak bisa mendapatkan atau menuntut haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar. Dengan demikian, diharapkan suami

⁵⁰Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara dilakukan pada bulan September 2017.

dalam masyarakat untuk sadar dan taat hukum dengan melakukan cerai talak di depan sidang Pengadilan Agama. cerai talak yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama adalah tidak ada kekuatan hukum atau tidak mempunyai kepastian hukum karena perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan. Dengan begitu, masyarakat Islam dapat menguti dengan mentaati sistem hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun diyakini bahwa hukum Islam yang termuat dalam fikih dari berbagai pemikiran para fuqaha dapat berlaku secara otomatis, namun masyarakat Islam tidak dapat mengabaikan penegakan hukum dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muin, Muhammad Hefni. "Tradisi Ngabula di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda)." *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* , Vol. 24, No. 2, 2016.
- Absori, Aidul Fitriadi, Azhari, M. Mui'nudillah & Fatkhul Muin. "Transformation of Maqashid A-Syariah (An Overview of the DEvelopment ofIslamic Law in IIndonesia) ." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.11, No. 1, 2016.
- Afandi, Moh. "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan Cedaw." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No.2, 2014.
- Ahmad, Miskari de. "Pendekatan Sistem sebagai Konsep Maqashid Syariah dalam Perspektif Jaser Audah." *Al-Maslahah; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No.1, 2018.
- Antoni, Nurdin Bakri. "Thalak di Luar Pengadilan menurut Fatwa Mpu Aceh No.2 Tahun 2015 tentang Thalok." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?" *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 15, No.2, 2018.
- Atho Muzdhar, Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Bakri, Muammar. "Pengembangan Karakter Toleran dalam Problematika Ikhtilaf Mahzab Fikih." *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 14, No. 1, 2014.
- Ernita, Aiya. *Perkawinan dengan Perempuan yang Dicerai di Luar Pengadilan (Studi di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*, Makalah.
- Febri Handayani & Syaflidar. "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian PerkaraPerceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan
Hukum Nasional di Indonesia

- Fikri. "Pemikiran Rahasia Hukum Islam dalam Ruang Publik (Huquq Allah)." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* , Vol.13, No.1, 2015.
- Fikri, Andi Bahri & Budiman. "Islamic Inheritance Legislation toward The National Law: The Analysis of Justice Values in Bacukiki." *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 17, No.1, 2017.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Pendapat ImamMazhab tentang Hak Istri Iddah Talak Baidan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Istimbath*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Hidayati, Rahmi. "Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian pada Suku Anak Dalam." *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 1, 2016.
- Hj. Sulaikan Lubis, et.al.,. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Hoyir, Yayan Sop Ahmad. "Pendapat Imam Malik Bin Anas tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia ." *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.16, No. 2, 2014.
- Ihwanudin, Nandang. "Pemenuhan KewajibanPasca Perceraian di Pengadilan Agama ." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 10, No.1, 2016.
- Jamaa, La. "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam." *Asy-Syir'ah; Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* , Vol. 47, No. 1, 2013.
- Lili Purnamasari, Iwannudin. "Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan MetroTimur." *Mahkamah*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Musawwamah, Siti. "Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama ." *Jurnal Al- Ihkam*, Vol.7, No.1, 2012.
- Muttaqin, Labib. "Positifisasi Hukum Islam dan Formulasi Syari'ah Ditinjau dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl." *Al-Ahkam*, Vol. 11, No. 1, 2016.
- Nasution, Bahder Johan. "Eksistensi Lembaga Peradilan dalam Negara Hukum sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.15, No. 2, 2015.
- Nasution, Khoiruddin. "Peran Kursus Nikah Membangun Hukum Keluarga Sejahtera." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XV, No. 2, 2015.
- Nimah, Zulfatun. "The Violation on Women's Right in Unilateral Divorce in Sasak Community from a Feminist Legal Theory." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2018.
- Parepare, Hakim Pengadilan Agama, interview by Wahidin Fikri. *Wawancara Dilakukan di Pengadilan Agama Parepare* (September Senin, 2017).
- Rahmat, Nurlaili. "Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan AdanyaPerma No. 1 Tahun 2016." *Ahkam; Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No.1, 2018.

- Rofid, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. "Fikih Al-Sunnah, Juz II." In *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, by Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 207. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sadari. *Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia*. Makalah.
- Salenda, Kasjim. "Hukum Islam Indonesia Sebagai Role Model Islam Nusantara." *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 16, No.1, 2016.
- Samsudin, Titin. "Dinamika Hukum Islam dan Perubahan Sosial." *Istinbath; Jurnal Hukum*, Vol.15, No.1, 2018.
- Setiyanto, Danu Aris. "Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia melalui Pendekatan Psikologi." *Al-Ahkam*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Supriadi, Dedi. *Fikih Munakahat Perbandingan, dari Tekstualitas Sampai Legislasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syar'i, Makmun. "Reformulasi Hukum Thalak di Luar Pengadilan." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tihani, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Winario, Mohd. "Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum." *Jurnal Al-Himayah*, Vol.1, No.2, 2017.
- Zainuddin, Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Zaman, Ahmad Misbahul. "Analisis Istihsan atas Pertimbangan Hakim terhadap Saksi Non Muslim pada Perkara Perceraian." *Al- Hukuma, The Journal of Islamic Family Law*, Vol. 08, No. 02, 2018.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Predana Media Group, 2010.
- Zuhri, Saifudin. "Menempatkan Nilai-Nilai Fikih Islam dalam Proses Modernisasi dan Perubahan Sosial, Studi tentang Teori al-Tufi Mazhab Hanbali." *Al-Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No.2, 2014.